

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda KM 5,5 ☎ (0513) 21010 - 21005

KUALA KAPUAS Kode Pos 73515

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas	7
2.1.2 Fungsi	7
2.1.3 Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas	20
2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	21
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	23
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	53
2.4.1 Tantangan	53
2.4.2 Peluang	53
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	55
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	55
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih	58
3.3 Telaah Renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	60
3.4 Telaah rencana tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	62
3.5 Penentuan Isu- isu Strategis	62
Bab IV Tujuan dan sasaran	64
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
Bab V Strategis dan Arah Kebijakan	66
5.1 Strategi dan arah Kebijakan Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas	66
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	69
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	92
Bab VIII Penutup	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	Jumlah aparatur Berdasarkan Golongan 21
Tabel	Komposisi Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan 22
Tabel	Komposisi data Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan 23
Tabel	Prasarana dan sarana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas 23
Tabel	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas sampai Dengan Tahun 2017 24
Tabel	Indikator kinerja utama setda tahun 2013-2018 25
Tabel T-C23	Pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas 27
Tabel T-C24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas 46
Tabel T-C24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas 49
Tabel 3.1	Analisis Layanan 56
Tabel 3.3.1	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 58
Tabel 3.3.2	Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 62
Tabel 3.4.1	Permasalahan Pelayanan PD Telaah rencana tata ruang wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 62
Tabel 3.4.2	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 63
Tabel 3.5	Identifikasi Isu-isu Strategis 63
Tabel T-C25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah 65
Tabel T-C26	Tujuan, sasaran Strategis dan Kebijakan 67
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendataan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas..... 70
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yag Mengacu Pada Tujuan Sasaran RPJMD 93

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administarastratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Implementasi dari otonomi daerah dimaksud khususnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan organisasi perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini akan menimbulkan suatu peluang dan tantangan didalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk tercapainya kemandirian daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat sampai ke pelosok desa.

Peluang dan tantangan perlu dikoordinasikan didalam menetapkan kebijakan – kebijakan strategis yang didasarkan pada norma, standar, kriteria, prosedur dan yang bersifat operasional dengan menyesuaikan pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan perubahan – perubahan eksternal yang terjadi tersebut, kiranya peran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai unsure staf yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administarastratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom menjadi penting dan strategis sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah melalui Bupati, yang nantinya diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam pembangunan di Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah saat ini kinerja Sekretariat Daerah dituntut lebih dinamis, kreatif dan responsive terhadap perubahan dan tuntutan yang berkembang ditengah masyarakat.

Paradigma baru pembangunan yang mengedepankan Tata Kepemerintahan yang Baik (good governace) menuntut adanya keterbukaan dan pertanggung jawaban kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka untuk menjawab tuntutan

pembangunan pemerintah seutuhnya, dan sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Bagian Kedua pasal 89 Tentang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). yang menetapkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Perencanaan Strategis merupakan sarana yang sekaligus kebutuhan nyata untuk mengatasi baik intern maupun ekstern sebagaimana persoalan yang dihadapi dalam era globalisasi saat ini. Rencana tersebut diharapkan akan merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2018 – 2023 dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan tata kerja.

Didalam Rencana Strategis (RENSTRA) terkandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan dimasa mendatang, Proses perencanaan strategis ini bertitik tolak kepada orientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala (kelemahan dan ancaman/ tantangan) yang ada, atau mungkin akan timbul. Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas tersebut, sangat diperlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan jaman.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor kebijakan dan koordinasi Perangkat Daerah (PD) serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Antisipasi terhadap perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting oleh karenanya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi Perangkat Daerah (PD) sehingga diharapkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas lebih efektif dan efisien.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa landasan hukum utama yang mengatur system, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) khususnya, serta perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah
8. Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan .

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor I Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 – 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan diseluruh perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran daerah kabupaten kapuas nomor 33).
13. Peraturan Daerah kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 53).
14. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Untu Menjabarkan RPJMD Kabupaten Kapuas 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas serta sebagai pedoman umum (guide line) dan arahan bagi aparatur Sekretariat Daerah serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Merumuskan Tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi secretariat daerah agar selaras dengan visi dan misi serta program prioritas yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
2. Menentukan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan tingkat kemampuan melaksanakan otonomi daerah.
3. Menggali kekurangan, potensi dan kemungkinan prospek pengembangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten kapuas.

4. Menjamin Berkelanjutan program yang telah dicapai sampai dengan tahun 2017. Artinya apa yang sudah dicapai sampai dengan tahun 2017 harus terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya serta menghindari terjadinya kemandekan (Stagnasi). Demi terwujudnya sinergitas, sinkronisasi, integritas dan koordinasi yang harmonis antara PD dan Penerapan regulasi kebijakan kepala daerah.

1.4 SISTEMATIK PENULISAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERSARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai salah satu perangkat Daerah yaitu menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

2.1.1 T U G A S

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2 F U N G S I

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah
4. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Instansi Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai wewenang, sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan

2. Pembinaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat
3. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksanaserta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah
4. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang – undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah.
5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dapat dilihat berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ada penggabungan 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Administrasi Kemasyarakatan Bergabung dengan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Perekonomian bergabung dengan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Bagian Humas dan Protokol Bergabung dengan Bagian Umum serta Penambahan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang mana semula berjumlah 12 (dua belas) Bagian, sehingga total Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas berjumlah menjadi 9 (Sembilan) Bagian.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- d. Asisten Administrasi Umum
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- g. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
- i. Kepala Bagian

A. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prsarana Pemerintah Kabupaten
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama, penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan serta hukum.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta pembinaan administrasi kependudukan serta hukum.
2. Perumusan kebijakan dan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan serta hukum.
3. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta hukum.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama, tugas pembantuan dan administrasi pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha bagian, tugas penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, hubungan kerjasama, tugas pembantuan dan administrasi pertanahan.
2. Pengkoordinasian penetapan dan penegasan batas antar kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi, verifikasi serta validasi nama unsure rupa bumi (toponimi) di kabupaten Kapuas.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pejabat daerah, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan wilayah dan daerah.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan hubungan kerja sama antar daerah, kerjasama dengan kementerian dan pihak ketiga serta kerjasama dengan luar negeri.
5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah umumbaik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan baik secara berkala maupun insidentil.
6. Fasilitasi pembinaan lembaga pemerintah ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan serta kedadangan.
7. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa (tampungantar).
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan criteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
10. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas 3 (tiga) Sub bagian :

1. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum
2. Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama
3. Kepala Subbagian Pertanahan

2.) Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan administrasi bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan system informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyatb menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
2. Menyusun bahan perencanaan strategis bidang administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
3. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
4. Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
5. Penyusunan bahan penyelenggaraan system informasi bidang administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
6. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Kepala Subbagian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala Subbagian Sosial dan Keagamaan
3. Kepala Subbagian Bina Kemasyarakatan

3.) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas koordinasi penyusunan dan perumusan rancangan peraturan perundang – undangan, kajian hukum, dokumentasi hukum, bantuan hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten serta koordinasi pemenuhan HAM.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan dan perumusan peraturan perundang – undangan.
2. Pengkajian dan penelaahan hukum.
3. Dokumentasi hukum
4. Penyelenggaraan bantuan hukum.
5. Pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten
6. Koordinasi Pemenuhan HAM
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Hukum Terdiri atas 3 (tiga) Sub bagian :

1. Kepala Subbagian Bantuan Hukum
2. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
3. Kepala Subbagian Perundang – undangan

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis perekonomian dan pembangunan daerah, pengkoordinasian penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan indikator perekonomian dan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah.
2. Penyusunan perencanaan strategis bidang perekonomian dan pembangunan daerah.
3. Pengkoordinasian bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan daerah.
4. Pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas perekonomian dan pembangunan daerah.
5. Pengkoordinasi penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa.
6. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan pembangunan daerah.
7. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1.) Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pembinaan administrasi bidang perekonomian dan sumber daya alam, penyelenggaraan system informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha milik daerah (BUMD), perbankan dan lembaga perkreditan rakyat.
2. Perumusan bahan kebijakan bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, energy dan sumber daya

mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, badan usaha milik daerah (BUMD), perbankan dan lembaga perkreditan rakyat.

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas 3 (tiga) Sub bagian :

1. Kepala Subbagian Penanaman Modal.
2. Kepala Subbagian Perdagangan dan Perindustrian
3. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam (SDA)

2.) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan di bidang fasilitasi kelompok kerja, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan dokumen serta layanan pengaduan pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang/ jasa.
2. Melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
3. Melakukan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Kepala Subbagian Pengelolaan pengadaan barang/ jasa
2. Kepala Subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
3. Kepala Subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa

3.) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan program lingkup Sekretariat Daerah, fasilitasi, koordinasi, pengendalian evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, serta penyelenggaraan sistem informasi elektronik barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan rencana kegiatan bagian administrasi pembangunan.
2. Merumuskan rencana strategis sekretariat daerah.
3. Merumuskan rencana kegiatan dan anggaran sekretariat daerah.
4. Merumuskan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah.
5. Merumuskan rencana kerja dan kinerja tahunan sekretariat daerah.
6. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah.
7. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah.
8. Merumuskan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah.
9. Merumuskan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sekretariat daerah.
10. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang penyusunan program, pembinaan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan.
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bagian administrasi pembangunan.
12. Melaksanakan fasilitasi pengordinasian penyelenggaraan administrasi dan perumusan bahan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman dan perhubungan.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian:

1. Kepala Subbagian Penyusunan Program
2. Kepala Subbagian Pembinaan dan pengendalian
3. Kepala Subbagian evaluasi dan pelaporan .

D. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, perencanaan strategis, pengkoordinasian penyelenggaraan system informasi, penyelenggaraan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta umum.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi umum.
2. Penyusunan perencanaan strategis bidang administrasi umum.
3. Pengkoordinasian bahan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta umum.
4. Pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta umum.
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan system informasi bidang organisasi, kepegawaian, keuangan dan aset serta umum.
6. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi kepegawaian, keuangan dan aset serta umum.
7. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan berdasarkan disposisi dan petunjuk dari pimpinan agar pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik.

Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1.) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang tugas penyusunan bahan pembinaan teknik ketatausahaan dan kepegawaian, melaksanakan urusan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tugas bagian umum.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang tugas bagian umum.
3. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi subbagian tata usaha dan kepegawaian, rumah, tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.
4. Penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi Subbagian tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.
5. Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Subbagian tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan protokol.
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas .
7. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Umum terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Kepala Subbagian Rumah Tangga
3. Kepala Subbagian Humas Pimpinan dan Protokol

2.) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Kepala bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, bimbingan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun kegiatan bagian organisasi berdasarkan hasil evaluasi kerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mengumpulakn dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan.
3. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan kelembagaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja dan pelaksanaan standarisasi jabatan dan pengembangan aparatur.

4. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman, petunjuk teknis, bimbingan dan penataan organisasi serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang tugas masing-masing.
6. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bimbingan guna bahan masukan dan pengambilan keputusan maupun kebijakan atasan.
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, bimbingan dan penataan organisasi serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang tugas masing-masing.
9. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Organisasi terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Kepala Subbagian Kelembagaan
2. Kepala subbagian tata laksana
3. Kepala Subbagian analisis dan formasi jabatan

3.) Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Kepala bagian keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset lingkup sekretariat daerah, menyiapkan laporan keuangan dan aset dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset lingkup sekretariat daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan belanja Sekretariat daerah.
3. Penyelenggaraan kegiatan verifikasi dan pembendaharaan keuangan Sekretariat daerah.

4. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keuangan dan Aset terdiri atas 3 (tiga) Sub bagian :

1. Kepala Subbagian Penatausahaan dan Verifikasi.
2. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
3. Kepala subbagian Aset.

E. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik.

F. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Staf Ahli Bupati Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan.

G. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan sumber daya manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Sekretariat daerah adalah sebagai berikut :

1. Penetapan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
2. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan sekretariat daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

4. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum dilingkungan sekretariat daerah ditetapkan dengan keputusan bupati.
5. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan keputusan bupati.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Sumber daya aparatur paada Satuan Organisasi Perangkat daerah (SOPD) Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas sebagai mana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah kabupaten Kapuas serta peraturan Bupati Kapuas Nomor 39 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas guna menunjang tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas terdiri dari 151 (seratus lima puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara dan 174 (seratus tujuh puluh empat) orang tenaga kontrak. Yang diklasifikasikan kedalam jenjang minimal Sekolah Dasar (SD) dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2.

Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang yang berbeda-beda. Berikut adalah table jumlah pegawai berdasarkan golongan.

Tabel

Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

Tahun 2018		
No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I A	1 Orang
	Golongan I B	0 Orang
	Golongan I C	0 Orang
	Golongan I D	0 Orang
2	Golongan II A	6 Orang
	Golongan II B	19 Orang
	Golongan II C	19 Orang
	Golongan II D	3 Orang

3	Golongan III A	26 Orang
	Golongan III B	15 Orang
	Golongan III C	14 Orang
	Golongan III D	18 Orang
4	Golongan IV A	11 Orang
	Golongan IV B	11 Orang
	Golongan IV C	7 Orang
	Golongan IV D	1 Orang
Jumlah		151 Orang

(Sumber : Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas)

Sumber Daya Manusia dengan kualitas dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung program kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Tabel

Komposisi Data Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2018								
No	Bagian	SD	SLTP	SLTA	DI DII DII I	SI D4	S2	S3
1	Bagian Tata Pemerintahan	0	0	3	0	6	2	0
2	Bagian Adm. Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	4	2	3	3	0
3	Bagian Hukum	0	0	4	0	5	1	0
4	Bagian Adm. SDA dan Ekonomi	0	0	1	0	7	1	0
5	Bagaian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	2	0	3	3	0
6	Bagian Adm. Pembangunan	1	0	4	0	4	0	0
7	Bagian Umum	1	1	31	0	22	11	0

8	Bagian Organisasi	0	0	3	0	5	2	0
9	Bagian Keuangan dan Aset	0	0	3	4	6	2	0
	Jumlah	2	1	53	6	61	25	0

(Sumber : Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas)

Tabel

Komposisi Data Pegawai Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2018						
	SD	SLTP	SLTA	DI DII DIII	SI D4	S2
	1	2	47	6	50	1
	3	2	47		9	
Jumlah	4	4	94	6	59	1

(Sumber : Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas)

2.2.2 **Kondisi Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas**

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transprtasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. secara lengkap jenis prasarana dan sarana yang dimiliki oleh sekrtariat daerah kabupaten Kapuas dapat dilihat pada table.

Tabel

Prasarana dan Sarana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI ASET
1	Ac. Sentral	3	Unit	Baik
2	AC. Split	35	Unit	Baik
3	Air Conditioning Unit	31	Unit	Baik
4	Alat Pemadam Kebakaran	4	Unit	Baik
5	Alat Pembersih lain-lain	3	Unit	Baik
6	Alat Pendingin lain-lain	2	Unit	Baik
7	Automatic Voltage Regulator (AVR)	1	Unit	Baik
8	Brand kas	2	Unit	Baik

9	Camera Digital Pocket	8	Unit	Baik
10	Camera Digital SLR	5	Unit	Baik
11	Facsmile	9	Unit	Baik
11	Filling Besi/ Mental	2	Unit	Baik
12	Handy Cam	2	Unit	Baik
13	Hard Disk	8	Unit	Baik
14	Intercom Unit Mic/ Wireless Mic	1	Unit	Baik
15	Kursi Biasa		Unit	Baik
16	Kursi Kerja	20	Unit	Baik
17	Kursi Lipat	34	Unit	Baik
18	Kursi Putar	4	Unit	Baik
19	Kursi Tamu	1	Unit	Baik
20	laptop	4	Unit	Baik
21	Lemari Besi	3	Unit	Baik
22	Lemari Es	10	Unit	Baik
23	Lemari Kaca	7	Unit	Baik
24	Lemari Kayu (Lemari Arsip)	1	Unit	Baik
25	Lemari Penyimpanan	27	Unit	Baik
26	Meja Bundar	13	Unit	Baik
27	Meja Kerja	3	Unit	Baik
28	Meja Rapat	4	Unit	Baik
29	Meja reseption	6	Unit	Baik
30	Meja Tambahan	7	Unit	Baik
31	Meja Tamu	1	Unit	Baik
32	Meja Telpon	1	Unit	Baik
33	Mesin Absen (tipe Recorder)	1	Unit	Baik
34	Mesin Ketik Manual	8	Unit	Baik
35	Mesin Potong Rumput	4	Unit	Baik
36	Mic Conference	2	Unit	Baik
37	Microphone	4	Unit	Baik
38	Microphone/ Wireless Mic	4	Unit	Baik
39	Mini Bus	37	Unit	Baik
40	Motor Boat	1	Unit	Baik
41	Note Book	11	Unit	Baik
42	papan Pengumuman	2	Unit	Baik
43	Papan Tulis	4	Unit	Baik
44	Pc. Unit	29	Unit	Baik
45	Personal Komputer	4	Unit	Baik
46	Pick Up	5	Unit	Baik
47	Printer	59	Unit	Baik
48	Sepeda	1	Unit	Baik
49	Sepeda motor	141	Unit	Baik
50	Sofa	11	Unit	Baik
51	Sound System	6	Unit	Baik
52	Speaker Aktif	1	Unit	Baik
53	Speed Boat	5	Unit	Baik
54	Tempat Spanduk	1	Unit	Baik
55	Tenda	5	Unit	Baik
56	White Board	2	Unit	Baik

(Sumber dari: Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas)

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2013-2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penilaian SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja	9, 50	9, 50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Jumlah Perangkat daerah yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	7	7
3	Meningkatnya kualitas dan sinergitas produk hukum daerah serta bantuan hukum	Jumlah produk hukum yang diselesaikan/ disahkan	5 30 600	5 30 600
4	Optimalnya penyelenggaraan adminitrasi pemerintah dan organisasi pemerintah	Persentase Kepatuhan LKHPN	40 %	40 %
		Ketepatan waktu penyampaian LPPD dan LKPJ	Tepat waktu	Tepat waktu
		jumlah bidang SPM yang dilaporkan	5	5
5	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	Jumlah pembentukan / perubahan STOK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4	4
		Persentase penyusunan dokumen analisis jabatan SKPD	100%	100%

6	Meningkatnya pelayanan administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	jumlah konflik/ sengketa yang dimediasi	25	25
---	---	---	----	----

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas disajikan pada Tabel T-C23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas disajikan pada tabel T-C24.

Tabel T-C 23
Pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Surat yang disediakan				1500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	1.500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	1500 Surat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Jumlah Aparatur internal yang terlayani setiap bulan				15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	Jumlah ASN Yang terlayani kesehatannya setiap bulan				5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	5 Org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
5	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan				5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
6	jumlah dokumen admisnistrasi yang disediakan				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7	jumlah gedung yang dialayani jasa kebersihannya				15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
8	Jumlah Sub Bagian Yang dilayani				15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	15 Sub Bag	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
9	Jumlah Cetak dan penggandaan yang disediakan				3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
10	jumlah ruangan yang dilayani penerangan listrik				10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	10 Ruangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
11	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan				5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
12	jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman				200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
13	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
14	jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan				5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

15	jumlah pelayanan ULP yang dilakukan							15 kali				kali	15 kali						100
16	Jumlah Buku Bacaan Yang Disediakan				20 buku	20 buku	20 buku	20 buku		20 buku	20 buku	20 buku	20		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
17	Cakupan terhadap Jasa Non PNS				50 persen	60 persen				50 persen	60 persen				120 persen	100 persen	persen	persen	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah gedung kantor yang dibangun				2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Jumlah Yang Kantor Camat Timpah yang Dibangun							1 unit					1 unit					100	
3	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan				2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan yang diadakan				2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 jenis	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
5	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
6	jumlah jenis peralatan rumah jabatan yang diadakan							2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	2 Jenis				100	100
7	jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan				3 jenis		3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis		3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen
8	jumlah jenis mebelur yang diadakan						8 jenis	8 jenis	8 jenis			8 jenis	8 jenis	8 jenis			100	100	100
9	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara				3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
10	jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
11	jumlah mobil jabatan yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

12	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
13	jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara				10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
14	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
15	jumlah jenis peralatan rumah jabatan yang dipelihara				2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
16	jumlah jenis peralatan gedung kantor yag dipelihara				5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
17	Jumlah Rumah yang Direhab				3 buah	3 buah	3 buah	3 buah		3 buah	3 buah	3 buah	3 buah		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
18	jumlah gedung kantor yang direhab					2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
19	jumlah mobil jabatan yang direhab				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
20	jumlah kendaraan dinas yang direhab				1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
21	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				4 unit					4 unit					100 Persen				

Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah PNS Yang Pensiun				7 orang	7 orang				7 orang	7 orang				100 Persen	100 Persen			
2	jumlah PNS yang tewas dalam melaksanakan tugas				1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	jumlah PNS yang dipindahkan				2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis				5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	jumlah peserta workshop dan pelatihan pengadaan barang dan jasa								21 org					21 org					100 Persen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15
1	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi yang disusun				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	jumlah laporan keuangan semester yang disusun				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	Jumlah Laporan Prognosis realisasi Anggaran Yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
5	jumlah laporan aset SKPD yang ditata dan disusun								6 Laporan					6 Laporan					100 Persen

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15
1	jumlah peserta Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4 orang		5 orang	5 orang	5 org	4 orang		5 orang	5 orang	5 org	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pengembangan dan Keserasian

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah pemuda yang memiliki potensi				3 org		3 org	3 org	3 org	3 org		3 org	3 org	3 org	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pengembangan data/ Informasi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah dokumen perencanaan yang dkumpul dan disusun				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	jumlah profil daerah yang disusun				1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen
3	jumlah data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang disusun								1 Dok					1 Dok					100 Persen
	Jumlah data yang terkumpul				2 Dok	2 Dok				2 Dok	2 Dok				100 Persen	100 Persen			

Program Pengembangan komunikasi,informasi dan media masa

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah data informasi yang disusun				4 Dok	4 Dok	4 Dok			4 Dok	4 Dok	4 Dok			100 Persen	100 Persen	100 Persen		
2	Jumlah alat studio dan komunikasi yang diadakan				1 buah	1 buah	1 buah	1 buah		1 buah	1 buah	1 buah	1 buah		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
3	Jumlah dokumen yang disusun tentang perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi				5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok		5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

Program Pengembangan Nilai Budaya

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah jenis adat budaya yang dilestarikan				5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	Cakupan tentang penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi				80 persen	80 perse n	80 persen			80 persen	80 persen	80 persen			100 persen	100 persen	100 persen		
---	--	--	--	--	---------------	-------------------	---------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--	--	---------------	---------------	----------------	--	--

Program Penigkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah lingkungan keamanan yang dikendalikan				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah jenis penanaman modal yang direncanakan dan dikembangkan								2 Jenis					2 Jenis					100 Persen
2	jumlah jenis kualitas SDM yang ditingkatkan				2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	jumlah investasi non fasilitas yang diawasi								2 Buah					2 Buah					100 Persen

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	jumlah tanah yang diadakan				2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Cakupan perencanaan pengadaan tanah				50 persen		50 persen	50 persen		50 persen		50 persen	50 persen		100 persen		100 persen	100 persen	
3	Cakupan persiapan pengadaan tanah				70 persen	70 persen	70 persen			70 persen	70 persen	70 persen			100 persen	100 persen	100 persen		
4	Cakupan tentang penataan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah				80 persen	80 persen	80 persen			80 persen	80 persen	80 persen			100 persen	100 persen	100 persen		

Program pengendalian pencemaran dan perusahaan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah dokumen yang disusun tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan perusak lingkungan hidup				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Cakupan tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup							70 persen					70 persen					100 persen	

Program peningkatan peran serta kepemudaan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah kegiatan aksi bhakti kepemudaan yang di laksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Menengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	Pemantauan Dana Pemerintah Untuk Disalurkan Kekoperasi				1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	------------	------------	------------	------------

Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah hari-hari besar yang diperingati				2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah kelompok masyarakat yang dibina				2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan Pelayanann Kedinasan daerah/ Wakil Kepala

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah kegiatan dialog yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	jumlah kunjungan kerja pejabat yang diterima				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	jumlah rapat unsur muspida yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	Jumlah rapat koordinasi pejbat pemerintah daerah yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
5	jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
6	jumlah rapat dengan pemerintah yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

7	jumlah orang yang dipelihara kesehatannya				2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
8	jumlah kunjungan dalam rangka umat beragama yang dilaksanakan						3 kali	3 kali				3 kali	3 kali		Persen	Persen	Persen	100 Persen	100 Persen

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah konflik-konflik pertanahan yang diselesaikan				3 masalah	3 masalah	3 masalah	3 masalah	3 masalah	3 masalah	3 masalah	3 masalah	3 masalah	3 masalah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah Jenis pemnafaatan SDA yang diawasi dan dikendalikan				1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan Kualitas Kelembagan Koperasi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah koperasi berprestasi yang dibina dan diawasi				2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan asongan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah kelompok pedagang kaki lima dan asongan yang diawasi				2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	2Kelompok	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen
2	Cakupan terhadap fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan																		

Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah Informasi Jejaring Lingkungan Pusat dan Daerah				2Buah	2Buah	2Buah	2Buah	2Buah	2Buah	2Buah	2Buah	2Buah	2Buah	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen	100Persen

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15
1	Cakupan pendampingan humas dan pers dalam kunjungan kerja bupati / wakil bupati di dalam dan di luar daerah				60persen	60persen	60persen	60persen		60persen	60persen	60persen	60persen		100persen	100persen	100persen	100persen	
2	Cakupan operasional radio siaran pemkab kapuas				60persen	60persen	60persen	60persen		60persen	60persen	60persen	60persen		100persen	100persen	100persen	100persen	

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017

	Fungsi SKPD			kato	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2010	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perencanaan pembangunan				10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan				2 kali		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali	2 kali	2 kali	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Proses Pengangkatan Bupati, Wakil Bupati dan sekretaris daerah Serta anggota dann Pimpinan DPRD				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Jumlah kasus yang ditangani				3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan				2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	Cakupan tentang penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah				80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 Persen	

Program Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah Data-data LKPJ dan LPPD kab. Kapuas yang tersusun				1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	jumlah Data dan Informasi Pembangunan Dikab. Kapuas						1 Lap	1 Lap	1 Lap			1 Lap	1 Lap	1 Lap			100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pelayanan dan Kesehatan Penduduk
Mickin

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah monitoring yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah daerah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah kerjasama yang terbentuk				3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	3 Krjsm	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targe t SPM	Target IKK	Targ et Indi kato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20-
1	jumlah Raperda yang tersusun				1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	10 org	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

3	jumlah Dokumentasi Produk Hukum				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
4	jumlah Naskah Akademik				2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Penataan daerahotonomi Baru

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah dokumen proses pemekaranan daerah yang dilaksanakan							2 Dok	2 Dok				2 Dok	2 Dok				100 Persen	100 Persen

Program Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah UKS yang dibina				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah jenis status pegawai yang diselesaikan								2 Jenis					2 Jenis					100 Persen
2	Jumlah Dokumen analisis				2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

3	Jumlah Laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara				2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Cakupan tentang penyusunan evaluasi jabatan				90 persen					90 persen					100 persen				

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah organisasi kelembaga yang dibina				2 Kel	2 Kel	2 Kel	2 Kel	2 Kel	2 Kel	2 Kel	2 Kel	2 Kel	2 Kel	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	jumlah organisasi ketatalaksanaan yang dibina				1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	1 Kel	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
3	jumlah SPIP yang disusun				1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
4	jumlah jenis reformasi dan birokrasi yang diselenggarakan								2 Jenis					2 Jenis					100 Persen
5	jumlah jenis kulaitas pelayanan publik yang ditingkatkan								2 Jenis					2 Jenis					100 Persen
6	Cakupan tentang penyusunan standar operasional (SOP)				100 persen					100 persen					100 persen				
7	Cakupan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)				100 persen					100 persen					100 persen				

Program Pengembangan Wilayah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	jumlah masalah yang diselesaikan				1 masalah	1 masalah	1 masalah	1 masalah	1 masalah	1 masalah	1 masalah	1 masalah	1 masalah	1 masalah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Program Pengembangan Lembaga Keagamaaan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah calon jam'ah Haji kabupaten Kapuas Setiap Tahunnya				400 Org	400 Org	500 Org	500 Org	500 Org	400 Org	400 Org	500 Org	500 Org	500 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Jumlah kapasitas rumah ibadah milik daerah							3 Dok	3 Dok				3 Dok	3 Persen				100 Persen	100 Persen
3	Jumlah kapasitas lembaga keagamaan								2 Dok					2 Persen					100 Persen
4	Jumlah STQ/ MTQ yang diselenggara								1 kali					1 Persen					100 Persen
5	Jumlah Pesparawi yang diselenggara								1 kali					1 Persen					100 Persen
6	Jumlah Festival seni Qasidah yang diselenggara								1 kali					1 Persen					100 Persen
7	Jumlah hari-hari besar agama Islam								2 kali					2 Persen					100 Persen
8	Jumlah Hari-hari besar agama kristen yang diselenggara								1 kali					1 Persen					100 Persen
9	jumlah pesta tandak yang diselenggara								2 kali					2 Persen					100 Persen

10	jumlah dharma gita yang diselegara							1 kali					1 Persen					100 Persen
----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	------------

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan tentang pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi				90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya				90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan terhadap penyusunan standar satuan harga				70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase tentang penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Persentase tentang				80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD				70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

4	Cakupan Terhadap penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan APBD				90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		100	100	100	100	
5	Cakupan Terhadap penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD				90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		100	100	100	100	
6	Cakupan Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		100	100	100	100	
7	Cakupan Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		100	100	100	100	
8	Persentase tentang Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan daerah						70 persen	70 persen				70 persen	70 persen				100	100	
9	Persentase tentang Peningkatan Manajemen Aset/ Barang daerah				90 persen		90 persen	90 persen		90 persen		90 persen	90 persen		100		100	100	
10	Persentase tentang Revaluasi/ Apprasial aset/ Barang daerah						80 persen	80 persen				80 persen	80 persen				100	100	
11	Persentase tentang penyusunan Sistem Informasi Barang daerah				80 persen		80 persen	80 persen		80 persen		80 persen	80 persen		100		100	100	

Program Kerja sama Informasi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	Cakupan terhadap penyebarluasan informasi pembangunan daerah				70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	70 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Cakupan terhadap penyebarluasan inforamsi penyelenggaraan pemerintah daerah				80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		80 persen	80 persen	80 persen	80 persen		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

Program Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan terhadap koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana				80 persen			80 persen		80 persen			80 persen		100 persen			100 persen	

Program Pencegahan Dini dan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase tentang pemantauan penyebarluasasn informasi potensi bencana alam				70 persen					70 persen					100 persen				

Program Peningkatan Disiplin

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	Cakupan terhadap pengadaan pakaian korpri				75 persen					75 persen					100 persen				
---	---	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan sekretariat daerah
Kabupaten Kapuas

No.	Uraian	Anggaran Renja pada Tahun ke- (Rp. 000)					DPA pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Renja dan DPA Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.457.135	11.502.848	12.653.133	13.918.446	15.310.219	10.708.023	14.769.725	15.461.967	14.186.949	14.424.829	102	128	122	102	94	12.333.402	12.333.382
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.195.000	21.114.500	23.225.950	25.548.545	28.103.399	947.281.842	2.779.996	15.065.440	11.403.864	6.003.170	4.935	13	65	45	21	2.164.170	2.163.183
3	Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	230.000	253.000	278.300	306.130	336.743	205.000	271.000	171.000	162.000	110.000	89	107	61	53	33	64.000	63.982
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	600.000	660.000	726.000	798.600	878.460	196.000	105.000	75.000	318.400	419.545	33	16	10	40	48	299.545	299.538
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	430.000	473.000	520.300	527.330	629.563	201.500	281.000	288.000	350.537	881.250	47	59	55	66	140	795.250	795.241
6	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Perempuan	23.500	-				21.500	-	15.000	18.000	20.000	91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15.300	15.282
7	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	48.000	-				45.000	-	54.000	39.000	54.500	94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	44.900	44.881
8	Pengembangan data/ Informasi	327.000	359.700	395.670	435.237	478.760	172.500	210.500	283.017	286.540	302.715	53	59	72	66	63	237.315	237.304
9	Pengembangan Komunikasi , Informasidan Media Massa	249.400	274.340	301.774	331.951	365.146	249.400	96.600	21.235	42.450		100	35	7	13	-	(49.880)	(49.900)
10	Pengembangan Nilai Budaya	48.000	55.000				45.000	50.000	60.000	44.700	1.003.175	94	91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	993.575	993.556
11	Pengembangan wilayah Transmigrasi	40.000	44.000	48.400	53.240	58.564	40.000	40.000	50.000			100	91	103	-	-	(8.000)	(8.020)
12	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	150.000	165.000	181.500	199.500	219.615	36.000	50.000	80.000	46.480	40.000	24	30	44	23	18	10.000	9.995
13	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	18.000	19.800	21.780	23.958	26.353	218.000	41.000	68.000	55.000	202.000	1.211	207	312	230	767	198.400	198.158
14	Penataan Pengusaan , Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	5.940.750	6.534.825	7.188.307	7.997.138	8.697.852	5.868.470	13.349.270	7.986.361	1.986.200	1.213.500	99	204	111	25	14	25.350	25.330

No.	Uraian	Anggaran Renja pada Tahun ke- (Rp. 000)					DPA pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Renja dan DPA Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	150.000	165.000	181.500	199.650	219.615	86.000	103.450	103.450	733.739	62.000	57	63	57	368	28	32.000	31.989
16	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	50.000	55.000	60.500	66.550	73.205	96.370	50.000		60.526	66.300	193	91	-	91	91	56.300	56.261
17	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	46.300	50.930	56.023	61.625	67.787	43.300	60.300	35.300	28.670	35.000	94	118	63	47	52	25.740	25.721
18	Pengembangan wawasan Kebangsaan	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100	724.000	300.000	296.900	327.233	411.825	72	27	25	25	28	211.825	211.811
19	Peningkatan Parsipasi masyarakat Dalam Membangun desa	150.000	165.000	181.500	199.650	219.615	72.990	50.000	100.000	91.650	84.000	49	30	55	46	38	54.000	53.990
20	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala daerah	1.685.000	1.853.500	2.038.850	2.242.735	2.467.008	1.900.000	3.700.000	4.235.000	3.289.257	6.665.000	113	200	208	147	270	6.328.000	6.327.977
21	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	90.000	99.000	108.900	119.790	131.769	90.000	121.000	148.000	89.160	112.160	100	122	136	74	85	94.160	94.140
22	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	150.000	165.000	181.500	199.650	219.615	125.000	169.500	169.500	154.950	100.000	83	103	93	78	46	70.000	69.983
23	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	120.800	132.880	146.168	160.784	176.863	120.800	110.800	120.800	102.600	130.000	100	83	83	64	74	105.840	105.820
24	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100.000	110.000	121.000	133.100	146.410	38.500	77.050	77.050	70.145	75.000	39	70	64	53	51	55.000	54.992
25	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	300.000	500.000				252.000	417.500	530.000	390.000		84	84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(60.000)	(60.017)
26	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	360.000	396.000	435.500	479.160	527.076	538.250	414.000	644.000	561.305	678.879	150	105	148	117	129	606.879	606.849
27	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	40.000	-				35.000	-	35.000	31.985	24.500	88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16.500	16.483
28	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	906.350	996.985	1.096.683	1.206.351	1.326.987	906.350	958.000	328.668	345.071	579.050	100	96	30	29	44	397.780	397.760
29	Perencanaan Pembangunan Daerah	90.000	99.000	108.900	119.790	131.769	90.000	88.000	595.000	400.205	387.386	100	89	546	334	294	369.386	369.366
30	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	15.000	60.000				10.000	50.000	45.000	45.137	30.000	67	83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27.000	26.987
31	Peningkatan Kerjasama Antar Pmerintah daerah	115.000	126.500	139.150	153.065	168.371	115.000	73.000	60.000	84.550	67.950	100	58	43	55	40	44.950	44.930
32	Penataan Peraturan Perundang-undangan	416.800	458.480	504.328	554.760	610.236	416.800	415.000	580.000	503.700	1.025.000	100	91	115	91	168	941.640	941.620

No.	Uraian	Anggaran Renja pada Tahun ke- (Rp. 000)					DPA pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Renja dan DPA Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	Penataan daerah Otonomi Baru	-	-				-	-			959.200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	959.200	#DIV/0!
34	Pembinaan Usaha Sekolah	20.000	30.000				15.000	25.000	40.000	36.593	45.000	75	83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	41.000	40.985
35	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	600.000	660.000	726.000	798.600	878.460	302.902	172.600	332.400	143.200	286.500	50	26	46	18	33	166.500	166.490
36	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	1.700.000	1.870.000	2.507.000	2.262.700	2.488.970	317.650	384.300	307.100	244.180	404.000	19	21	12	11	16	64.000	63.996
37	Pengembangan Wilayah Perbatasan	1.046.000	1.150.600	1.265.660	1.392.226	1.531.448	1.141.000	236.000	1.212.000	671.150	324.535	109	21	96	48	21	115.335	115.313
38	Pengembangan lembaga Keagamaan	210.000	231.000	254.100	279.510	307.461	210.000	310.000	335.000	347.839	7.548.729	100	134	132	124	2.455	7.506.729	7.506.709
39	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	70.000	77.000	84.700	93.170	102.487	70.000	55.000	76.750	132.530		100	71	91	142	-	(14.000)	(14.020)
40	Pengelolaan Keragaman Budaya	500.000	550.000	605.000	665.500	732.050	570.200	66.000	219.500	160.050		114	12	36	24	-	(100.000)	(100.023)
41	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	1.292.352	1.421.557	1.563.713	1.720.084	1.892.093	2.401.803	776.020	2.719.500	2.135.924		186	55	174	124	-	(258.470)	(258.508)
42	Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	1.150.000	1.265.000	1.391.500	1.530.650	1.683.715	1.150.000	1.732.500	3.076.150	1.760.250		100	137	221	115	-	(230.000)	(230.020)
43	Pembinaan Pedagang kaki Lima dan asongan	71.000	78.100	85.910	94.501	103.951	71.000	54.900	75.900	63.060	57.000	100	70	88	67	55	42.800	42.780
44	Perencanaan Pembangunan daerah Rawan Bencana	44.000	48.400.000	53.240	58.564	64.420	44.000	-				100	-	-	-	-	(8.800)	(8.820)
45	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	44.000	48.400	53.240	58.564	64.420	44.000	-				100	-	-	-	-	(8.800)	(8.820)
46	Peningkatan Dislipin Aparatur	800.000	880.000	968.000	1.064.800	1.171.280	809.206	-				101	-	-	-	-	(160.000)	(160.020)
47	Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah	75.000	82.500	90.750	99.825	109.807	-	75.000				-	91	-	-	-	(15.000)	(15.000)
48	Pengembangan data/ Informasi/ Statistik Daerah	50.000	55.000	60.500	66.550	73.205	-	50.000				-	91	-	-	-	(10.000)	(10.000)

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan sekretariat daerah
Kabupaten Kapuas

No.	Uraian	Anggaran Pagu DPA pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran DPA pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.708.023	14.769.725	15.461.967	14.186.949	14.424.829	6.226.263	12.467.923	12.013.984	13.630.978	15.577.131	58	84	78	96	108	13.435.526	13.435.515
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	947.281.842	2.779.996	15.065.440	11.403.864	6.003.170	1.512.520	62.890.779	13.859.422	8.328.230	5.851.272	0	2.262	92	73	97	(183.605.096)	(183.605.096)
3	Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS	205.000	271.000	171.000	162.000	110.000	147.465	167.269	76.596	24.220	119.840	72	62	45	15	109	78.840	78.826
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	196.000	105.000	75.000	318.400	419.545	159.970	92.992	54.882	192.415	384.752	82	89	73	60	92	345.552	345.536
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	201.500	281.000	288.000	350.537	881.250	115.101	252.497	247.592	322.865	828.870	57	90	86	92	94	788.570	788.559
6	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Perempuan	21.500	-	15.000	18.000	20.000	-	-	3.250	2.705	13.000	-	#DIV/0!	22	15	65	8.700	8.700
8	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	45.000	-	54.000	39.000	54.500	28.653	-	45.574	34.218	48.936	64	#DIV/0!	84	88	90	39.936	39.923
9	Pengembangan data/ Informasi	172.500	210.500	283.017	286.540	302.715	104.830	188.918	105.970	97.081	302.460	61	90	37	34	100	267.960	267.948
10	Pengembangan Komunikasi , Informasidan Media Massa	249.400	96.600	21.235	42.450		40.900	45.970	210.540	49.384	-	16	48	991	116	#DIV/0!	(49.880)	(49.883)
11	Pengembangan Nilai Budaya	45.000	50.000	60.000	44.700	1.003.175	28.653	44.474	51.512	223.126	870.331	64	89	86	499	87	861.331	861.318
12	Pengembangan wilayah Transmigrasi	40.000	40.000	50.000			1.620	39.299	21.108	-	-	4	98	42	#DIV/0!	#DIV/0!	(8.000)	(8.001)
13	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	36.000	50.000	80.000	46.480	40.000	1.800	47.018	73.013	35.074	37.920	5	94	91	75	95	30.720	30.719
14	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	218.000	41.000	68.000	55.000	202.000	213.535	34.559	31.360	40.623	185.492	98	84	46	74	92	141.892	141.872

No.	Uraian	Anggaran Pagu DPA pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran DPA pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Penataan Pengusaan , Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	5.868.470	13.349.270	7.986.361	1.986.200	1.213.500	76.708	12.695.621	4.573.555	1.323.815	1.025.017	1	95	57	67	84	(148.677)	(148.677)
16	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	86.000	103.450	103.450	733.739	62.000	62.672	94.712	102.508	727.705	57.240	73	92	99	99	92	40.040	40.025
17	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	96.370	50.000		60.526	66.300	13.125	39.400	43.762	8.479	65.035	14	79	#DIV/0!	14	98	45.761	45.758
18	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	43.300	60.300	35.300	28.670	35.000	14.920	50.691	19.939	26.789	26.131	34	84	56	93	75	17.471	17.464
19	Pengembangan wawasan Kebangsaan	724.000	300.000	296.900	327.233	411.825	375.000	297.554	294.634	383.668	408.343	52	99	99	117	99	263.543	263.533
20	Peningkatan Parsipasi masyarakat Dalam Membangun desa	72.990	50.000	100.000	91.650	84.000	9.327	36.750	93.197	86.440	80.855	13	74	93	94	96	66.257	66.254
21	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ wakil Kepala daerah	1.900.000	3.700.000	4.235.000	3.289.257	6.665.000	901.614	2.320.627	3.060.116	4.268.057	5.987.027	47	63	72	130	90	5.607.027	5.607.018
22	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	90.000	121.000	148.000	89.160	112.160	69.197	117.651	143.877	85.912	110.590	77	97	97	96	99	92.590	92.575
23	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	125.000	169.500	169.500	154.950	100.000	97.517	153.377	168.802	152.683	97.457	78	90	100	99	97	72.457	72.441
24	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	120.800	110.800	120.800	102.600	130.000	88.376	100.720	110.963	96.596	108.569	73	91	92	94	84	84.409	84.394
25	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	38.500	77.050	77.050	70.145	75.000	52.697	64.906	77.050	69.696	71.321	137	84	100	99	95	63.621	63.594
26	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	252.000	417.500	530.000	390.000		179.401	410.757	502.024	648.958	-	71	98	95	166	#DIV/0!	(50.400)	(50.414)
27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	538.250	414.000	644.000	561.305	678.879	122.037	397.030	632.833	720.117	675.696	23	96	98	128	100	568.046	568.041
28	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik	35.000	-	35.000	31.985	24.500	495	-	32.478	30.919	18.247	1	#DIV/0!	93	97	74	11.247	11.247
29	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	906.350	958.000	328.668	345.071	579.050	103.393	831.750	277.064	401.816	476.062	11	87	84	116	82	294.792	294.790

No.	Uraian	Anggaran Pagu DPA pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran DPA pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Perencanaan Pembangunan Daerah	90.000	88.000	595.000	400.205	387.386	28.081	85.472	359.189	343.965	374.902	31	97	60	86	97	356.902	356.896
31	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	10.000	50.000	45.000	45.137	30.000	-	22.595	30.946	18.293	28.756	-	45	69	41	96	26.756	26.756
32	Peningkatan Kerjasama Antar Pmerintah daerah	115.000	73.000	60.000	84.550	67.950	39.503	66.727	54.642	65.554	61.575	34	91	91	78	91	38.575	38.568
33	Penataan Peraturan Perundang-undangan	416.800	415.000	580.000	503.700	1.025.000	225.046	382.001	553.061	568.923	750.596	54	92	95	113	73	667.236	667.225
34	Penataan daerah Otonomi Baru	-	-			959.200	-	-	-	40.563	177.922	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	19	177.922	#DIV/0!
35	Pembinaan Usaha Sekolah	15.000	25.000	40.000	36.593	45.000	900	23.156	36.323	36.502	40.550	6	93	91	100	90	37.550	37.549
36	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	302.902	172.600	332.400	143.200	286.500	143.888	164.610	304.766	139.246	280.084	48	95	92	97	98	219.504	219.494
37	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	317.650	384.300	307.100	244.180	404.000	162.757	302.949	256.975	244.932	348.975	51	79	84	100	86	285.445	285.435
38	Pengembangan Wilayah Perbatasan	1.141.000	236.000	1.212.000	671.150	324.535	139.907	232.961	1.176.062	679.724	622.270	12	99	97	101	192	394.070	394.068
39	Pengembangan lembaga Keagamaaan	210.000	310.000	335.000	347.839	7.548.729	-	248.735	331.768	635.048	6.739.516	-	80	99	183	89	6.697.516	6.697.516
40	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	70.000	55.000	76.750	132.530		51.290	42.935	63.464	134.883	-	73	78	83	102	#DIV/0!	(14.000)	(14.015)
41	Pengelolaan Keragaman Budaya	570.200	66.000	219.500	160.050		513.488	65.540	194.095	143.130	-	90	99	88	89	#DIV/0!	(114.040)	(114.058)
42	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	2.401.803	776.020	2.719.500	2.135.924		313.960	501.689	1.920.820	1.996.100	-	13	65	71	93	#DIV/0!	(480.361)	(480.363)
43	Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	1.150.000	1.732.500	3.076.150	1.760.250		27.527	48.611	67.383	4.047	50.145	2	3	2	0	#DIV/0!	(179.855)	(179.855)
44	Pembinaan Pedagang kaki Lima dan asongan	71.000	54.900	75.900	63.060	57.000	27.527	48.611	67.383	-	-	39	89	89	-	-	(14.200)	(14.208)
45	Perencanaan Pembangunan daerah Rawan Bencana	44.000	-				1.862	-	-	177.823	-	4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(8.800)	(8.801)
46	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	44.000	-				4.200	-	-	-	-	10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(8.800)	(8.802)
47	Peningkatan Dislipin Aparatur	809.206	-				8.300	-	-	-	-	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(161.841)	(161.841)

No.	Uraian	Anggaran Pagu DPA pada Tahun ke- (Rp. 000)					Realisasi Anggaran DPA pada Tahun ke - (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah	-	75.000				-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
49	Pengembangan data/ Informasi/ Statistik Daerah	-	50.000				-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya membantu bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah. factor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas selama 5 (Lima) Tahun kedepan:

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. Tantangan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Ketersedianya sumber daya aparatur yang masih belum optimal;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan;
3. semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pembangunan;
4. Lemahnya koordinasi baik sektoral maupun antar antar daerah;
5. Belum tersedianya sistem dan prosedur kerja yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap pakai terampil dan professional dibidangnya;
7. Kurangnya komitmen dari masing-masing pimpinan dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan secara efektif;

2.4.2 Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan potensi/kemampuan. peluang yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dari masing-masing pimpinan dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan secara efektif sehingga program kerja yang jelas akan mengarahkan semua pegawai untuk melaksanakan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;
2. Ketersediaan teknologi yang semakin canggih sehingga diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dapat diarsipkan untuk

mendukung tupoksi bagi kepentingan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas;

3. Ketersediaan sumber daya alam;
4. Ketersediaan sumber daya manusia;
5. Ketersediaan bimtek-bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM;
6. Tersedianya dana APBD untuk menunjang berbagai program kegiatan operasional dengan mengupayakan peningkatan dana dan penajaman prioritas program kegiatan;
7. Adanya motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah serta menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Adapun Analisis Layanan Permasalahan Sekretariat Daerah kabupaten Kapuas diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
ANALISIS LAYANAN

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar permasalahan
1	2	3	4
1	Kurang Optimalnya tata Kelola Penyelenggaraan pemerintahan	Rendahnya kualitas MATERI pelaporan capaian kinerja pemerintah	masih banyaknya data yang tidak tersedia dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah
		Penataan peraturan perundang-undangan yang kurang efektif	prosedur dalam penataan peraturan perundang-undangan masih belum efektif
			minimnya sosialisasi dan publikasi produk hukum yang telah diundangkan
			Mobilisasi kuasa hukum pemerintah daerah dalam menangani perkara TUN/ Pidana/ Perdata masih minim
		Rendahnya pengelolaan data dan informasi	pembaharuan profil daerah belum dilakukan secara berkala
		Kerjasama antar daerah, lembaga dan pihak swasta belum memperoleh hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan	kurangnya kerjasama antar daerah dalam peningkatan kualitas publik
		pengembangan wilayah perbatasan masih belum optimal	belum selesainya penataan batas wilayah antar kecamatan dan penataan batas dengan kabupaten
		Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH belum berjalan dengan baik	Penyelesaian tindak lanjut belum menjadi bahan evaluasi pengawasan internal
		Rendahnya penyelesaian konflik-konflik masyarakat melalui mediasi	Penyelesaian konflik pertanahan lebih mengutamakan dilaksanakan oleh badan peradilan
		Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah	Peran kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah masih kurang
			kurang tersedianya data dan informasi pendukung pemekaran daerah
		Pembinaan dan dukungan dalam kegiatan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat masih rendah	fasilitasi kegiatan kemasyarakatan/ keagamaan belum terlaksana dengan baik
			monitoring dan evaluasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum maksimal
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah belum dimanfaatkan sebagai umpan balik	Laporan kinerja dan keuangan belum disusun secara optimal

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar permasalahan
1	2	3	4
		Pembinaan dan pengembangan organisasi ketatalaksanaan belum optimal	Penerapan analisis jabatan, beban kerja serta evaluasi jabatan belum optimal Prosedur standarisasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik belum terlaksana dengan baik Masih terdapat kelembagaan yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
2	Pengendalian pembangunan serta fasilitasi perekonomian dan sumber daya alam belum terlaksana dengan baik	rendahnya penyelesaian konflik-konflik masyarakat melalui mediasi	penyelesaian konflik SDA lebih mengutamakan dilaksanakan oleh badan peradilan
		Pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat belum dilaksanakan secara maksimal	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan kesehatan belum optimal Koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan ketagakerjaan transmigrasi dan P3APKB belum terlaksana dengan baik
		Fasilitasi pengembangan ekonomi dfaerah dan SDA masih rendah	Fasilitasi penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan sumber daya alam belum optimal
		Rendahnya pengendalian terhadap perencanaan pembangunan	Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan belum terlaksana dengan baik
3	Rendahnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan adminitrasi dan layanan umum	Layanana informasi belum diperbaharui secara berkala	Cakupan kehumasan dan pers dalam kunjungan kerja bupati/ wakil bupati masih rendah
		Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan belum mumpuni	Masih adanya sarana dan prasarana aparatur serta fasilitasi kedinasan dalam kondisi rusak

3.2 **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD Tahun 2018-2023). Di dalam RPJMD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju,Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan yang Adil dan Merata Serta Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan tersebut diatas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka di paparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Faktor-faktor tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel : TB-35
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata Serta Berkelanjutan.				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 1 : Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan - Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Program Administrasi Pembangunan Energi dan Sumber daya Mineral	- Minimnya data. - Terbatasnya SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi	Terbatasnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi SDM bidang teknologi informasi	Terbukanya kesempatan untuk mengikuti diklat di dalam dan luar daerah.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata Serta Berkelanjutan.				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Misi 5 : Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Program Penataan Peraturan perundang-undangan 	<p>Masih Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antar daerah</p>	<p>Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi</p>	<p>Kemauan dan semangat untuk melaksanakan tugas</p>
	<p>Misi 7 : Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Administrasi dan fasilitasi Pembangunan Ekonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya data dan informasi tentang usaha masyarakat - Terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi pemodalan usaha bagi masyarakat 	<p>Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait</p>	<p>Tersedianya kredit dari perbankan</p>

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata Serta Berkelanjutan.				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Misi 14 : Mempercepat Reformasi birokrasi menuju pelayanan prima dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatandan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif (Rt/ Rw, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang dan mantir)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatn pengembangan sistem pelaoran capaian kinerja dan keuangan - Program Pengembangan data /informasi - Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah - Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi - Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - Program Perencanaan pembangunan - Program Penataan daerah otonomi baru - Program pembinaan dan pengembangan aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM aparatur yang kompeten - Belum tersusunnya standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas - Struktur organisasi belum mampu menjawab tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi - Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah - Belum tercukupinya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku masih terbatas - Pemahaman aparatur tentang pengelolaan keuangan sesuai standar akutansi masih kurang - Belum dilakukan kajian komprehensif tentang kebutuhan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Semangat dan kemauan yang tinggi untuk melakukan perubahan kearah lebih baik - Tersedianya anggaran untuk pembinaan aparatur - Tersedianya anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

	<ul style="list-style-type: none">- Program pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan- Program administrasi pembinaan dan kelembagaan keagamaan- Program administrasi pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat- Program pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja pemerintah- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah- Program pengembangan wilayah perbatasan- Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan- Program Administrasi Pelaksanaan Kegiatan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga- Program Penanganan konflik sumber daya alam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan perternakan- Program Pengembangan wawasan Kebangsaan			
--	---	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaah terhadap Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga terkait dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota lain menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan PD yang memperngaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayananana PD Kabupaten Lain	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayananana PD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menjelaskan tentang faktor-faktor Penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau daeri Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 3.4.1

Permasalan Pelayanan PD berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Rencana tata Ruang Wilayah terkait Tupoksi PD	Permasalahan Pelayananana PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

Tabel 3.4.2

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No	Hasil KLHS terkait Tuposi PD	Permasalahan Pelayanana PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis diambil dengan melakukan review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (PD) ditinjau dari :

- 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah (PD).
- 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.
- 3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.
- 4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan Perangkat Daerah (PD).
- 5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Perangkat Daerah (PD).

Tabel 3.5

Identifikasi Isu-isu Strategis

No	Isu Strategis		
	Internasional	Nasional	Regional/ Lokal
1	2	3	4
	-	-	-

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas disajikan pada Tabel T-C25

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD Yang Nilai Sakipnya Minimal B	Persentase	60	70	80	90	92
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Skor EPPD	Skor	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi diperangkat daerah	Persentase PD Yang nilai Reformasi Birokrasinya MinimalB	Persentase	60	70	80	90	92
		Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	Persentase Perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	80	90	90	90	90
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan layanan Administrasi dan sarana Prasarana sekretariat daerah	IKM Internal Setda	indeks	77	78	79	80	81
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan barang dan jasa	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang dan jasa	Indeks	77	78	79	80	81
		Terwujudan layanan Publik Kemasyarakatan	IKM Eksternal Setda	indeks	3,15	3,25	3,40	3,50	3,60
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Terhadap Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Rasio	97	97,5	98	98,5	99

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dalam lima tahun mendatang disajikan pada Tabel T-C.26

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan sekretariat daerah	Pemenuhan kelengkapan data kinerja dan keuangan yang akurat
		Meningkatkan kinerja pengelolaan data dan informasi	Pembaharuan profil daerah dilakukan secara berkala
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja pemerintah	penyiapan dan perbaiki data serta bahan pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
		Mengembangkan pelaksanaan otonomi daerah	meningkatkan peran kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah
	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi diperangkat daerah	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah	meningkatkan ketersediaan data dan informasi pendukung pemekaran daerah
			menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan
		Melakukan penataan peraturan perundang-undangan secara efektif	Perbaiki prosedur dalam penataan peraturan perundang-undangan
			Mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi produk hukum yang telah diundangkan
		Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan	Evaluasi secara berkala penerapan analisis jabatan, beban kerja serta evaluasi jabatan
			Perbaiki ketatalaksanaan dengan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama		Reviu kelembagaan secara berkala sesuai dengan ketentuan undang-undang
		memperkuat kerjasama antar daerah, lembaga dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan	Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik
	Meningkatnya kepuasan layanan administrasi dan sarana prasarana sekretariat daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana aparatur serta fasilitasi kedinasan sesuai dengan kebutuhan
		Meningkatnya kualitas layanan informasi	meningkatkan cakupan kehumasan humas dan pers dalam kunjungan kerja bupati/ wakil bupati
	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Meningkatnya pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
	Terwujudnya layanan publik kemasyarakatan	memperkuat pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketenagakerjaan transmigrasi dan P3APKB
		Meningkatkan penyelesaian konflik-konflik masyarakat melalui mediasi	penyelesaian konflik SDA dengan mengutamakan mediasi pemerintah daerah
		Menyelesaikan penataan wilayah perbatasan	Penataan batas wilayah antar kecamatan dan penataan batas dengan Kabupaten lainnya
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap elektrifikasi	Peningkatan kualitas dan tata kelola lingkungan hidup	peningkatan koordinasi lintas struktur (PLN pemerintah Provinsi) dalam penyediaan pemerataan kebutuhan listrik masyarakat
			Penguatan dalam pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatn ya kepuasan layanan adminitrasi sarana dan prasarana Sekretariat daerah	4.01 .4.01.03 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	11.574.104	100 Persen	9.123.500	100 Persen	9.041.604	100 Persen	8.657.500	100 Persen	11.340.500	100 Persen	49.737.208	Bagian Umum, Bagian Keuangan dan aset serta Bagian layanan Pengadaan barang dan jasa	
		4.01 .4.01.03 .01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan jasa Surat menyurat	150 Jumlah	150 Jumlah	2.533.000	150 Jumlah	2.271.896	150 Jumlah	2.339.000	150 Jumlah	2.261.000	150 Jumlah	2.683.000	150 Jumlah	12.087.896	Bagian Umum	
		4.01 .4.01.03 .01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	33 Jumlah	33 Jumlah	2.112.000	33 Jumlah	1.400.000	33 Jumlah	1.400.000	33 Jumlah	1.400.000	33 Jumlah	1.970.204	33 Jumlah	8.282.204	Bagian Umum	
		4.01 .4.01.03 .01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeriharaan Kesehatan PNS	Jumlah penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	20 Jumlah	20 Jumlah	20.000	20 Jumlah	20.000	20 Jumlah	20.000	20 Jumlah	20.000	20 Jumlah	20.000	20 Jumlah	100.000	Bagian Umum	
		4.01 .4.01.03 .01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	50 Jumlah	50 Jumlah	220.992	50 Jumlah	220.992	50 Jumlah	220.992	50 Jumlah	220.000	50 Jumlah	220.992	50 Jumlah	1.103.968	Bagian Umum	
		4.01 .4.01.03 .01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	50 Jumlah	50 Jumlah	1.705.000	50 Jumlah	1.300.000	50 Jumlah	1.150.000	50 Jumlah	950.000	50 Jumlah	1.426.192	50 Jumlah	6.531.192	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 .01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan jasa adminitrasi keuangan	20 Jumlah	20 Jumlah	151.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	151.000	20 Jumlah	151.000	20 Jumlah	151.000	20 Jumlah	704.000	Bagian Keuangan dan aset	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Kebersihan kantor	100 Jumlah	100 Jumlah	1.256.112	100 Jumlah	1.100.112	100 Jumlah	1.100.112	100 Jumlah	1.100.000	100 Jumlah	1.463.612	100 Jumlah	6.019.948	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	100 Jumlah	100 Jumlah	300.000	100 Jumlah	250.000	100 Jumlah	250.000	100 Jumlah	250.000	100 Jumlah	300.000	100 Jumlah	1.350.000	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetak dan penggandaan	20 Jumlah	20 Jumlah	300.000	20 Jumlah	200.000	20 Jumlah	200.000	20 Jumlah	200.000	20 Jumlah	200.000	20 Jumlah	1.100.000	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25 Jumlah	25 Jumlah	75.000	25 Jumlah	75.000	25 Jumlah	75.000	25 Jumlah	75.000	25 Jumlah	75.000	25 Jumlah	375.000	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	20 Jumlah	20 Jumlah	80.000	20 Jumlah	80.000	20 Jumlah	80.000	20 Jumlah	80.000	20 Jumlah	80.000	20 Jumlah	400.000	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	200 Jumlah	200 Jumlah	1.027.500	200 Jumlah	800.000	200 Jumlah	800.000	200 Jumlah	800.000	200 Jumlah	1.200.000	200 Jumlah	4.627.500	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	25 Jumlah	25 Jumlah	1.250.000	25 Jumlah	1.005.000	25 Jumlah	955.000	25 Jumlah	850.000	25 Jumlah	1.250.000	25 Jumlah	5.310.000	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.3 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasidan konsultasi kedalam daerah	25 Jumlah	25 Jumlah	300.500	25 Jumlah	300.500	25 Jumlah	300.500	25 Jumlah	300.500	25 Jumlah	300.500	25 Jumlah	1.502.500	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 01 . 22	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Kegiatan Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	200 Kegiata n	200 Kegiata n	243.000										243.000	Bagian Layanan Pengadaan barang Dan Jasa	
																	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatny a kepuasan layanan adminitrasi sarana dan	4.01 . 4.01.03. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	7.393.000	100 Persen	2.991.000	100 Persen	2.541.000	100 Persen	2.451.000	100 Persen	2.910.000	100 Persen	18.286.000	bagian umum dan Bagian Keuangan dan Aset	
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	10 unit	10 unit	4.475.000	9 unit	1.500.000	8 unit	1.000.000	8 unit	1.000.000	8 unit	1.075.000	8 unit	9.050.000		
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah rumah jabatan yang dilayani	3 Rujab	3 Rujab	300.000										300.000	Bagian umum	
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah AC	10 Unit	10 Unit	55.000											55.000	Bagian umum
				jumlah TV Led	2 Unit	2 Unit													
				jumlah dispenser	3 Unit	3 Unit													
				jumlah kulkas 2 Pintu	3 Unit	3 Unit													
				Jumlah Kipas Angin	4 Unit	4 Unit													
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah rumah jabatan yang disediakan peralatannya	3 Rujab	3 Rujab	100.000										100.000	Bagian umum	
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah komputer Dekstop	5 Unit	5 Unit	200.000											200.000	Bagian umum
				jumlah laptop	10 Unit	10 Unit													
				jumlah printer	10 Unit	10 Unit													
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah terlaksananya mebeleur	20 Jumlah	20 Jumlah	220.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	620.000	Bagian umum	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20	Pemelihaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	6 rujab	6 rujab	100.000										100.000	Bagian umum			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	170.000										170.000	Bagian umum			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	320.000										320.000	Bagian umum			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan Operasional yang dipelihara	51 Unit	51 Unit	245.000										245.000	Bagian umum			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				jumlah speedboat yang dipelihara	4 Unit	4 Unit													
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	80.000											80.000	Bagian umum
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah AC Gedung Kantor Yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	80.000											80.000	Bagian umum
				Jumlah Kulkas Yang dipelihara	6 Unit	6 Unit													
				Jumlah Perlengkapan Penerangan Yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit													
				Jumlah Mesin Pompa Air Yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit													
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Genset Rujab Bupati, wabup dan Sekda	3 Unit	3 Unit	58.000											58.000	Bagian umum
				Jumlah BBM Mesin Rumput Rujab	3 Unit	3 Unit													
				Jumlah Genset & tabung Pemadam Kebakaran	5 Unit	5 Unit													
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Mesin Genset Yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	80.000											80.000	Bagian umum
				Jumlah Mesin Potong Rumput Yang Diperihala	7 Unit	7 Unit													
				Jumlah BBM Mesin Rumput	7 Unit	7 Unit													
				Jumlah Komputer PC dan laptop	15 Unit	15 Unit													
				Jumlah Printer	15 Unit	15 Unit													
				Jumlah Tabung pemadam	5 Unit	5 Unit													
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang Rehab Berat	2 unit	2 unit	300.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Jumlah Jenis Jaringan Listrik Kantor Bupati Kapuas Yang Direhab	1 Jenis	1 Jenis											300.000	Bagian umum	
		4.01 . 4.01.03 . 02 . 45	Pemeliharaan rutin/ Berkala bangunan Milik Pemerintah daerah	Jumlah terlaksananya Pemeliharaan rutin/ Berkala bangunan Milik Pemerintah daerah	10 Jumlah	10 Jumlah	450.000	10 Jumlah	300.000	10 Jumlah	350.000	10 Jumlah	300.000	10 Jumlah	450.000	10 Jumlah	1.850.000	Bagian Keuanganda n aset	
		4.01 . 4.01.3 . 02 . 46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Milik Pemerintah Daerah	20 Jumlah	20 Jumlah	160.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	160.000	20 Jumlah	160.000	20 Jumlah	680.000	Bagian Keuangan dan Aset	
			Pengadaan kendaraan operasional	Jumlah terlaksana pengadaan kendaraan dinas/ operasional	10 unit			10 unit	75.000	10 unit	75.000	10 unit	75.000	10 unit	75.000	10 unit	300.000	Bagian Umum	
			Pengadan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah jabatan dinas	jumlah ter;aksana pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah jabatan/ dinas	20 Jumlah			20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	600.000	Bagian Umum	
			Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah jabatan dan gedung kantor	Jumlah terlaksananyaPemelihaara n rutin/ berkala Rumah jabatan dan gedung kantor	20 Jumlah			20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	250.000	20 Jumlah	700.000	Bagian Umum	
			Pemeliharaan rutin berkala Mobil jabatan dan kendaraan operasional	Jumlah terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala Mobil jabatan dan kendaraan operasional	15 Jumlah			15 Jumlah	200.000	15 Jumlah	200.000	15 Jumlah	150.000	15 Jumlah	200.000	15 Jumlah	750.000	Bagian Umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan dan gedung kantor	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan dan gedung kantor	20 Jumlah			20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	100.000	20 Jumlah	400.000	Bagian Umum	
			Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan dan gedung kantor	jumlah terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan dan gedung kantor	20 Jumlah			20 Jumlah	200.000	20 Jumlah	200.000	20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	200.000	20 Jumlah	750.000	Bagian Umum	
			Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan dan kendaraan operasional	Jumlah teerlaksananya Rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan dan kendaraan operasional	20 Jumlah			20 Jumlah	116.000	20 Jumlah	116.000	20 Jumlah	116.000	20 Jumlah	150.000	20 Jumlah	498.000	Bagian Umum	
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan layanan administrasi sarana dan prasarana Sekretariat daerah	4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Persentase diklat ASN terpenuhi sesuai dengan kompetensi	90 Persen	90 Persen	324.000	90 Persen	23.500	90 Persen	23.500	90 Persen	23.500	90 Persen	23.500	90 Persen	418.000	Bagian umum dan bagian layanan Pengadaan barang dan jasa	
		4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan formal	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 asn	10 asn	13.500	10 asn	13.500	10 asn	13.500	10 asn	13.500	10 asn	13.500	10 asn	67.500	Bagian Umum	
		4.01 . 4.01.03 . 05 . 14	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	110 org	110 org	125.500										125.500	Bagian Layanan Pengadaan barang Dan Jasa	
		4.01 . 4.01.03 . 05 . 15	Bimbingan Teknis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	15 org	15 org	175.000										175.000	Bagian Layanan Pengadaan barang Dan Jasa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4.01 . 4..01.3 .05. 17	Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Jumlah keikut sertaan dalam forum sekretaris daerah	5 Jumlah	5 Jumlah	10.000	5 Jumlah	10.000	5 Jumlah	10.000	5 Jumlah	10.000	5 Jumlah	10.000	5 Jumlah	50.000	Bagian Organisasi	
Meningkatk an penyelengg araan pemerintah daerah	Meningkatny a akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	4.01 . 4.01.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang disampaiaikan tepat waktu	90 persen	90 persen	379.000	90 persen	1.039.000	90 persen	853.000	90 persen	753.000	90 persen	853.000	90 persen	3.877.000	Bagian Organisasi dan bagian Keuangan dan aset	
		4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja selesai tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	140.000	12 Laporan	400.000	12 Laporan	225.000	12 Laporan	225.000	12 Laporan	225.000	12 Lapora n	1.215.000	Bagian Adminbang	
		4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	jumlah laporan keuangan semester yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	4.500	1 Laporan	4.500	1 Laporan	4.500	1 Laporan	4.500	1 Laporan	4.500	1 Lapora n	22.500	Bagian Keuangan dan Aset	
		4.01 . 4.01.03 . 06 . 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan Pronogsis selesai tepat waktu	5 laporan	5 laporan	3.500	5 laporan	3.500	5 laporan	3.500	5 laporan	3.500	5 laporan	3.500	5 laporan	17.500	Bagian Keuangan dan Aset	
		4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	Penyusunan Pelaporan Keungan akhir Tahun	Laporan keuangan selesai tepat waktu	5 laporan	5 laporan	6.000	5 laporan	6.000	5 laporan	6.000	5 laporan	6.000	5 laporan	6.000	5 laporan	30.000	Bagian Keuanganda n aset	
		4.01 . 4.01.03 . 06 . 05	Penataan dan Penyusunan Pelaporan Aset SKPD	Laporan aset selesai tepat waktu	5 laporan	5 laporan	225.000	5 laporan	225.000	5 laporan	200.000	5 laporan	100.000	5 laporan	200.000	5 laporan	950.000	Bagian Keuangan dan Aset	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah daerah	laporan kinerja selesai tepat waktu	4 Laporan			4 Laporan	100.000	4 Laporan	100.000	4 Laporan	100.000	4 Laporan	100.000	4 Lapora n	400.000	Bagian Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pemerintah	laporan pertanggung jawaban diselesaikan tepat waktu	3 Laporan			3 Laporan	100.000	3 Laporan	114.000	3 Laporan	114.000	3 Laporan	114.000	3 Lapora n		bagian tata Pemerintaha n	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Yang disusun	3 Dokum en			3 Dokume n	200.000	3 Dokume n	200.000	3 Dokume n	200.000	3 Dokumen	200.000	3 Dokum en	800.000	Bagian adminbang	
Meningkatk an penyelengg araan pemerintah daerah	Meningkatny a akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	4.03 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Data / Informasi	Persentase capaian data kinerja yang tersedia	90 Persen	90 Persen	360.390	90 Persen	350.000	90 Persen	300.000	90 Persen	350.000	90 Persen	350.000	90 Persen	1.710.390	Bagian Adm. Pembanguna n, Bagian tata Pemerintaha n dan bagian Layanan Pengadaan	
		4.03 . 4.01.03 . 15 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Pereencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	10 dokume n	10 dokume n	105.390	10 dokume n	150.000	10 dokume n	150.000	10 dokume n	150.000	10 dokumen	150.000	10 dokum en	705.390	Bagian Adm. Pembanguna n	
		4.03 . 4.01.03 . 15 . 05	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah Penyusunan Profil daerah	5 jumlah	5 jumlah	100.000	5 jumlah	100.000	5 jumlah	100.000	5 jumlah	100.000	5 jumlah	100.000	5 jumlah	100.000	5 jumlah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4.03 . 4.01.03 . 15 . 08	Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang disusun	2 Dok	2 Dok	155.000										155.000	Bagian Layanan Pengadaan barang Dan Jasa	
			Penyiapan data/ informasi nama rupa bumi dikabupaten kapuas	jumlah data/ informasi nama rupa bumi	10 Data			10 Data	100.000	10 Data	50.000	10 Data	100.000	10 Data	100.000	10 Data	350.000	Bagian Tapem	
Meningkatn ya kapasitas dan akuntabilita s kinerja pemerintah daerah	meningkatnya kualitasdalam pelaksanaan tugas penyelenggara an pemerintah daerah	2.04 . 4.01.03 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Tanah Yang Diadakan	3 Ha	3 Ha	340.000										340.000	Bagian tata Pemerintaha n	
		2.04 . 4.01.03 . 16 . 07	Pelaksanaan Pengadaan Tanah		3 Ha	3 Ha	340.000										340.000	Bagian tata Pemerintaha n	
Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi dan layanan umum	1.05 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase hari besar nasional dan daerah yang dilaksanakan	80 Persen	80 Persen	225.000	80 Persen	225.000	80 Persen	225.000	80 Persen	200.000	80 Persen	225.000	80 Persen	1.100.000	Bagian tata Pemerintaha n	
		1.05 . 4.01.03 . 17 . 05	Peringatan Hari- Hari Besar dan Bersejarah	Jumlah peringatan hari- hari besar bersejarah	10 Kali	10 Kali	225.000	10 Kali	225.000	10 Kali	225.000	10 Kali	200.000	10 Kali	225.000	10 Kali	1.100.000	Bagian tata Pemerintaha n	
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan layanan adminitrasi sarana dan prasarana Sekretariat daerah	4.01. 4.01.03 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 Persen	100 Persen	4.229.396	100 Persen	3.140.000	100 Persen	3.140.000	100 Persen	3.040.000	100 Persen	3.640.000	100 Persen	17.189.396	Bagian umum dan bagian Kemas Kesra	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4.01. 4.01.03 . 17 . 01	Dialog / Audensi Dengan Tokoh- tokoh Masyarakat Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi dialog / audensi	25 Fasilitasi	25 Fasilitasi	1.295.000	25 Fasilitasi	1.000.000	25 Fasilitasi	1.000.000	25 Fasilitasi	900.000	25 Fasilitasi	1.000.000	25 Fasilitasi	5.195.000	Bagian umum	
		4.01. 4.01.03 . 17 . 02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah non Departemen / Luar negeri	jumlah pelaksanaan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ dipartermen / lembaga pemerintah non departermen/ luar negeri	10 kali	10 kali	810.000	10 kali	500.000	10 kali	500.000	10 kali	500.000	10 kali	810.000	10 kali	3.120.000	Bagian umum	
		4.01. 4.01.03 . 17 . 03	Rapat Unsur Muspida	Jumla rapat unsur muspida	10 Kali	10 Kali	20.000	10 Kali	20.000	10 Kali	20.000	10 Kali	20.000	10 Kali	20.000	10 Kali	100.000	Bagian umum	
		4.01. 4.01.03 . 17 . 04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	jumlah rapat pejabat pemerintah daerah	20 Kali	20 Kali	20.000	20 Kali	20.000	20 Kali	20.000	20 Kali	20.000	20 Kali	20.000	20 Kali	100.000	Bagian umum	
		4.01. 4.01.03 . 17 . 05	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Dearah	jumlah kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah	30 Kunjung an	30 Kunjung an	290.000	30 Kunjunga n	200.000	30 Kunjunga n	200.000	30 Kunjung an	200.000	30 Kunjunga n	290.000	30 Kunjun gan	1.180.000	Bagian umum	
		4.01. 4.01.03 . 17 . 06	Rapat / Pertemuan Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	jumlah rapat/ Pertemuan Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	20 Kali	20 Kali	1.594.396	20 Kali	1.000.000	20 Kali	1.000.000	20 Kali	1.000.000	20 Kali	1.000.000	20 Kali	5.594.396	Bagian umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4.01. 4.01.03 . 17 . 07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	10 Jumlah	10 Jumlah	200.000	10 Jumlah	200.000	10 Jumlah	200.000	10 Jumlah	200.000	10 Jumlah	200.000	10 Jumlah	1.000.000	Bagian umum	
			Kunjungan Kerja kegiatan keagamaan dalam rangka pembinaan umat beragama	Jumlah Kunjungan Kerja kegiatan keagamaan dalam rangka pembinaan umat beragama	20 Kunjung an			20 Kunjunga n	200.000	20 Kunjunga n	200.000	20 Kunjung an	200.000	20 Kunjunga n	300.000	20 Kunjun gan	900.000	Bagian kemaskesra	
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatny a fasilitas pelayanan terhadap elektrifikasi	2.04 . 4.01.03 . 17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	jumlah konflik-konflik pertanahan yang diselesaikan	3 masala h	3 masala h	60.000										60.000	Bagian tata Pemerintah an	
		2.04 . 4.01.03 . 17 . 01	Penyelesaian Konflik-konflik Pernahan	jumlah konflik-konflik pertanahan yang diselesaikan	3 kasus	3 kasus	60.000										60.000	Bagian tata Pemerintah an	
Meningkatk an kualitas pelayanan publik	Meningkatny a kepuasan layanan adminitrasi sarana dan prasarana Sekretariat daerah	2. 10 . 4.01.03 . 19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase publikasi kunjungan kerja pada media massa	100 Persen	100 Persen	225.000	100 Persen	275.000	100 Persen	275.000	100 Persen	250.000	100 Persen	275.000	100 Persen	1.300.000	Bagian Umum	
		2. 10 . 4.01.03 . 19 . 02	Pendampingan Humas dan Pers Dalam Kunjungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati di dalam dan Luar Daerah	Jumlah pendampingan humas dan pers	60 kali	60 kali	225.000	60 kali	225.000	60 kali	225.000	60 kali	200.000	60 kali	225.000	60 kali	1.100.000	Bagian umum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Penyediaan informasi pada sekretariat daerah	jumlah media massa dan bahan informasi	5 Media massa			5 Media massa	50.000	5 Media massa	50.000	5 Media massa	50.000	5 Media massa	50.000	5 Media massa	200.000	Bagian umum	
Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pengaduan barang dan jasa	4.03 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Yang Disusun Tentang Perencanaan Pembangunan daerah	1 lap	1 lap	628.879										628.879	Bagian Adm. Pembangunan	
		4.03 . 4.01.03 . 20 . 02	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Perlengkapan Pendukung dan Operasional LPSE	20 Org	20 Org	628.879										628.879	bagian Adm. Pembangunan	
				Jumlah Dokumen Pengendalian Implementasi Dukungan Pembantuan LPSE	1 Dok	1 Dok													
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Registrasi Dan Verifikasi LPSE	1 Dok	1 Dok													
				Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pembinaan Standarisasi LPSE	1 Dok	1 Dok													
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah	meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.01 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase kepatuhan wajib lapor LHKPN	90 Persen	90 Persen	305.000	90 Persen	255.000	90 Persen	255.000	90 Persen	255.000	90 Persen	255.000	90 Persen	1.325.000	Bagian Hukum, Bagian TataPemerintahan dan bagian Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4.01 . 4.01.03 . 20 . 03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah dokumen atas fasilitasi kepala daerah	5 Dukume n	5 Dukume n	85.000	5 Dukume n	50.000	5 Dukume n	50.000	5 Dukume n	50.000	5 Dukumen	50.000	5 Dukum en	285.000	Bagian TataPemerin tahan	
		4.01 . 4.01.03 . 20 . 04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	Jumlah kasus yang ditangani	8 Kasus	8 Kasus	125.000	8 Kasus	75.000	8 Kasus	75.000	8 Kasus	75.000	8 Kasus	75.000	8 Kasus	425.000	bagian hukum	
		4.01 . 4.01.03 . 20 . 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	jumlah tindak lanjut hasil temuan	5 Temuan	5 Temuan	30.000	5 Temuan	30.000	5 Temuan	30.000	5 Temuan	30.000	5 Temuan	30.000	5 Temua n	150.000	bagian hukum	
		4.01 . 4.01.03 . 20 . 07	Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pilkada	jumlah laporan pelaksanaan pilkada/ pemilu	5 Laporan	5 Laporan	65.000	5 Laporan	50.000	5 Laporan	50.000	5 Laporan	50.000	5 Laporan	50.000	5 Lapora n	265.000	Bagian tata Pemerintaha n	
			Pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara	jumlah wajib lapor yang menyampaikan LKPHN	2 Laporan			2 Laporan	50.000	2 Laporan	50.000	2 Laporan	50.000	2 Laporan	50.000	2 Lapora n	200.000	Bagian Organisasi	
Meningkatn ya penyelengg araan pemerintah daerah	meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi diperangkat daerah	4.03 . 4.01.03 . 21	Program Administrasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Jenis Pembangunan Daerah Yang direncanakan	2 Jenis	2 Jenis	265.731										265.731	Bagian tata Pemerintaha n dan Bagian Adm. Pembanguna n	
		4.03 . 4.01.03 . 21 . 13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Laporan Pengadaan Barang dan jasa Paket Strategis dan Non Strategis	1 Dok	1 Dok	265.731										265.731	bagian Adm. Pembanguna n	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Program Realissasi APBD	12 Dok	12 Dok													
				Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Dikecamatan	1 Dok	1 Dok													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah	meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	4.01 . 4.01.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	persentase MOU yang ditindak lanjuti	80 Persen	80 Persen	60.000	100 Persen	60.000	100 Persen	60.000	100 Persen	60.000	100 Persen	60.000	100 Persen	300.000	Bagian tata Pemerintahan	
		4.01 . 4.01.03 . 25 . 01	Kerjasama Antar Daerah Dalam penyediaan Pelayanan Publik	jumlah penandatanganan MOU	20 MOU	20 MOU	60.000	20 MOU	60.000	20 MOU	60.000	20 MOU	60.000	20 MOU	60.000	20 MOU	300.000	Bagian tata Pemerintahan	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah	meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi diperangkat daerah	4.01 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perda yang ditetapkan sesuai SOP	80 Persen	80 Persen	645.000	90 Persen	475.000	90 Persen	475.000	90 Persen	475.000	90 Persen	475.000	90 Persen	2.545.000	bagian Hukum	
		4.01 4.01.03 . 26 . 03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7 Raperda	7 Raperda	320.000	7 Raperda	220.000	7 Raperda	220.000	7 Raperda	220.000	7 Raperda	220.000	7 Raperda	1.200.000	Bagian hukum	
		4.01 4.01.03 . 26 . 04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Kali	5 Kali	120.000	5 Kali	75.000	5 Kali	75.000	5 Kali	75.000	5 Kali	75.000	5 Kali	420.000	bagian hukum	
		4.01 4.01.03 . 26 . 05	Publikasi Peraturan peraturan perundang-undangan	Jumlah publikasi peraturan perundang-undangan	80 Jumlah	80 Jumlah	125.000	80 Jumlah	100.000	80 Jumlah	100.000	80 Jumlah	100.000	80 Jumlah	100.000	80 Jumlah	525.000	bagian hukum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		4.01 4.01.03 . 26 . 06	Kajian Peraturan Perundang- undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang- undangan Yang Baru Lebih Tinggi Dan Keserasian antar Peraturan Perundang- undangan Daerah	jumlah kajian akademis yang disusun	3 jumlah	3 jumlah	80.000	3 jumlah	80.000	3 jumlah	80.000	3 jumlah	80.000	3 jumlah	80.000	3 jumlah	400.000	Bagianhuku m	
Meningkatn ya penyelengg araan pemerintah daerah	Meningaktny a kinerja penyelenggar aan pemerintah daerah	4.01 . 4.01.03 . 27	Program Otonomi daerah	persentase standar pelayanan minimal yang tercapai	80 Persen	80 Persen	530.000	80 Persen	450.000	80 Persen	450.000	80 Persen	450.000	80 Persen	450.000	80 Persen	2.330.000	Bagian tata Pemerintaha n	
		4.01 . 4.01.03 . 27 . 01	Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	jumlah laporan data daninformasi proses pemekaran daerah	2 laporan	2 laporan	180.000	2 laporan	100.000	2 laporan	100.000	2 laporan	100.000	2 laporan	100.000	2 laporan	580.000	Bagian tata Pemerintaha n	
		4.01 . 4.01.3 27 . 02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Otonomi Daerah dan Kecamatan	jumlah laporan pembinaan otonomi daerah kecamatan dan kelurahan	2 laporan	2 laporan	200.000	2 laporan	200.000	2 laporan	200.000	2 laporan	200.000	2 laporan	200.000	2 laporan	1.000.000	Bagian tata Pemerintaha n	
		4.01 . 4.01.3 . 27 . 03	Pembinaan Pelayanann Publik Pada Pemerintah Daerah	jumlah jenis pembinaan pelayanan publik	3 Jenis	3 Jenis	50.000	3 Jenis	50.000	3 Jenis	50.000	3 Jenis	50.000	3 Jenis	50.000	3 Jenis	250.000	Bagian tata Pemerintaha n	
			Penguatan Penyelengagaraann Pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan Penguatan Penyelengagaraann Pemerintah daerah	1 Keg	1 Keg	100.000	1 Keg	100.000	1 Keg	100.000	1 Keg	100.000	1 Keg	100.000	1 Keg	500.000	Bagian tata Pemerintaha n	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan															Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah					
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatny a kepuasan layanan administrasi dan sarana prasarana sekretariat daerah	4.01 . 4.01.03 . 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase usul status pegawai yang tepat waktu	80 Persen	80 Persen	78.920	80 Persen	20.000	80 Persen	20.000	80 Persen	20.000	80 Persen	20.000	80 Persen	158.920	Bagian umum			
		4.01 . 4.01.03 . 30 . 14	penyelesaian usul status pegawai	jumlah penyelesaian usul status pegawai	15 Orang	15 Orang	20.000	15 Orang	20.000	15 Orang	20.000	15 Orang	20.000	15 Orang	20.000	15 Orang	100.000	Bagian umum			
			Pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN Yang Melapor Tepat Waktu	50 Persent ase	50 Persent ase	58.920										58.920	Bagian Organisasi			
Meningkatn ya penyelengg araan pemerintah daerah	Meningkatny a kualitas penerapan reformasi birokrasi perangkat daerah	4.01 . 4.01.03 . 31	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	persentase rencana aksi reformasi birokrasi yang diselesaikan	85 Persen	85 Persen	552.580	85 Persen	555.000	85 Persen	555.000	85 Persen	555.000	85 Persen	555.000	85 Persen	2.772.580	Bagian Organisasi			
		4.01 . 4.01.03 . 31 . 01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan	jumlah penetapan penataan kelembagaan	2 Jumlah	2 Jumlah	125.000	2 Jumlah	125.000	2 Jumlah	125.000	2 Jumlah	125.000	2 Jumlah	125.000	2 Jumlah	625.000	Bagian Organisasi			
		4.01 . 4.01.03 . 31 . 02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ketatalaksanaan	persentase perangkat daerah yang menetapkan SOP	60 Persen	60 Persen	40.000	60 Persen	40.000	60 Persen	40.000	60 Persen	40.000	60 Persen	40.000	60 Persen	200.000	Bagian Organisasi			
		4.01 . 4. 01. 03 . 30 . 20	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	Persentase hasil Analisis Jabatan SKPD	80 percent ase	80 percent ase	167.580	80 percenta se	100.000	80 percenta se	100.000	80 percenta se	100.000	80 percentas e	100.000	80 percent ase	567.580	Bagian organisasi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang menetapkan standar pelayananan	77 Persen	77 Persen	110.000	77 Persen	110.000	77 Persen	110.000	77 Persen	110.000	77 Persen	110.000	77 Persen	550.000	Bagian Organisasi	
			Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi reformasi birokrasi	5 Jumlah	5 Jumlah	110.000	5 Jumlah	110.000	5 Jumlah	110.000	5 Jumlah	110.000	5 Jumlah	110.000	5 Jumlah	550.000	Bagian organisasi	
			Penyusunan Satandar kompetensi Jabatan	Persentase Penyusunan Dokumen SKJ	80 Persen			80 Persen	70.000	80 Persen	70.000	80 Persen	70.000	80 Persen	70.000	80 Persen	280.000	Bagian organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	terwujudnya layanan publik kemasyarakat an	4.01 . 4.01.03 . 32	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	persentase perbatasan antar daerah yng memiliki legislasi	80 Persen	80 Persen	1.181.000	80 Persen	750.000	80 Persen	771.896	80 Persen	800.000	80 Persen	1.000.000	80 Persen	4.502.896	Bagian tata Pemerintaha n	
		4.01 . 4.01.03 . 32 . 01	Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar daerah	jumlah laopran hasil penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	10 Laporan	10 Laporan	1.181.000	10 Laporan	750.000	10 Laporan	771.896	10 Laporan	800.000	10 Laporan	1.000.000	10 Lapora n	4.502.896	Bagian tata Pemerintaha n	
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	terwujudnya layanan publik kemasyarakat an		Program Administrasi dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Daerah	inflasi kabupaten kapuas	100 Persen	100 Persen	462.000	100 Persen	350.000	100 Persen	350.000	100 Persen	350.000	100 Persen	350.000	100 Persen	1.862.000	bagian Adm. Perekonomi an dan SDA	
			Sosialisasi dan pemantauan pengembangan usaha mikro kecil menengah	jumlah kegiatan sosialisasi dan pemantauan pengembangan UKM	5 Keg	5 Keg	73.000	5 Keg	70.000	5 Keg	70.000	5 Keg	70.000	5 Keg	70.000	5 Keg	353.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	
			Pemantauan kinerja koperasi dan kelembagaan	jumlah kegiatan pemantauan kinerja koperasi dan kelembagaan	5 Keg	5 Keg	68.000	5 Keg	50.000	5 Keg	50.000	5 Keg	50.000	5 Keg	50.000	5 Keg	268.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	
			pelaksanaan pengendalian inflasi daerah	jumlah kegiatan terlaksananya pelaksanaan pengendalian inflasi daerah	6 Keg	6 Keg	102.000	6 Keg	90.000	6 Keg	90.000	6 Keg	90.000	6 Keg	90.000	6 Keg	462.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	
			sosilaisasi pengembangan ekonomi kratif	jumlah kegiatan pengembangan ekonomi kreatif	6 Keg	6 Keg	133.000	6 Keg	90.000	6 Keg	90.000	6 Keg	90.000	6 Keg	90.000	6 Keg	493.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			pemantauan dan peningkatan promosi dan kerjasama investasi	jumlah kegiatan terlaksananya pemantauan peningkatan promosi dan kerjasama investasi	4 Keg	4 Keg	86.000	4 Keg	50.000	4 Keg	50.000	4 Keg	50.000	4 Keg	50.000	4 Keg	286.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	terwujudnya layanan publik kemasyarakatan		Program Penanganan Konflik Sumber Daya Alam Bidang Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Perternakan	persentase rekomendasi pertanahan dan SDA yang ditindaklanjuti	80 Persen	80 Persen	77.000	80 Persen	110.000	80 Persen	110.000	80 Persen	110.000	80 Persen	110.000	80 Persen	517.000	bagian Adm. Perekonomi an dan SDA	
			fasilitasi penyelesaian konflik-konflik sumber daya alam	Persentase Mediasi Konflik	80 Persen	80 Persen	77.000										77.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	
			Fasilitasi mediasi konflik-konflik pertanahan	jumlah konflik pertanahan yang dimediasi	5 Konflik			5 Konflik	60.000	5 Konflik	60.000	5 Konflik	60.000	5 Konflik	60.000	5 Konflik	240.000	Bagian PSDA	
			Fasilitasi mediasi penyelesaian konflik-konflik sumber daya alam	jumlah konflik sumber daya alam yang dimediasi	5 Konflik			5 Konflik	50.000	5 Konflik	50.000	5 Konflik	50.000	5 Konflik	50.000	5 Konflik	200.000	Bagian PSDA	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan terhadap elektrifikasi		Program peningkatan layanan administrasi pembangunan energi dan sumber daya mineral daerah	persentase peningkatan layanan administrasi pembangunan energi dan SDA	100 Persen	100 Persen	716.000	100 Persen	468.000	100 Persen	468.000	100 Persen	368.000	100 Persen	468.000	100 Persen	2.488.000	bagian Adm. Perekonomi an dan SDA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			pembangunan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5 Keg	5 Keg	648.000	5 Keg	400.000	5 Keg	400.000	5 Keg	300.000	5 Keg	400.000	5 Keg	2.148.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	
			pemanfaatana gas tambang dan minyak	jumlah laporan pemantauan	3 laporan	3 laporan	68.000	3 laporan	68.000	3 laporan	68.000	3 laporan	68.000	3 laporan	68.000	3 laporan	340.000	bagian Adm. Perekonomia n dan SDA	
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	terwujudnya layanan publik kemasyarakatan		Program adminitrasi pelaksanaan kegiatan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	Cakupan adminitrasi pelaksanaan kegiatan, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	100 Persen	100 Persen	465.000									465.000	Bagian Kemas Kesra		
			Fasilitasi Perhimpunan Pelajar mahasiswa Yang Menempuh Pendidikan Diluar Daerah	Jumlah jenis fasilitasi yang difasilitasi	5 Jenis	5 Jenis	270.000									270.000	Bagian Kemas Kesra		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring yang dilakukan	3 Kali	3 Kali	50.000									50.000	Bagian Kemas Kesra		
			Penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	jumlah jenis bea siswa yang diselenggarakan	2 Jenis	2 Jenis	85.000									85.000	Bagian Kemas Kesra		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)	Jumlah monitoring yang dilakukan	3 Kali	3 Kali	60.000										60.000	Bagian Kemas Kesra	
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	terwujudnya layanan publik kemasyarakatan		Program adminitrasi pembinaan dan kelembagaan keagamaan	Persentase tentang adminitrasi pembinaan dan kelembagaan keagamaan	100 Persen	100 Persen	1.865.939	100 Persen	950.000	100 Persen	950.000	100 Persen	950.000	100 Persen	1.050.000	100 Persen	5.765.939	Bagian Kemas Kesra	
			pengembangan lembaga keagamaan	cakupan pengembangan lembaga keagamaan	80 Persen	80 Persen	400.000	80 Persen	250.000	80 Persen	250.000	80 Persen	250.000	80 Persen	250.000	80 Persen	1.400.000	Bagian Kemas Kesra	
			pelayanan ibadah haji	Jumlah jemaah haji tiap tahun	500 Org	500 Org	700.000	500 Org	400.000	500 Org	400.000	500 Org	400.000	500 Org	500.000	500 Org	2.400.000	Bagian Kemas Kesra	
			pengelolaan rumah ibadah milik pemerintah daerah	Jumlah rumah ibadah yang dikelola	6 Buah	6 Buah	400.000	6 Buah	300.000	6 Buah	300.000	6 Buah	300.000	6 Buah	300.000	6 Buah	1.600.000	Bagian Kemas Kesra	
			Kunjungan kerja kepala daerah dalam rangka pembinaan umat beragama	Jumlah kunjungan yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	365.939										365.939	Bagian Kemas Kesra	
Meningkatn ya Kualitas pelayanan Publik	terwujudnya layanan publik kemasyarakatan		Program adminitrasi pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	IKM layanan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	80 Indeks	80 Indeks	169.061	90 Indeks	210.000	90 Indeks	245.000	90 Indeks	289.000	90 Indeks	414.000	90 Indeks	1.327.061	Bagian Kemas Kesra	
			monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan kesehatan	Jumlah monitoring yang dilakukan	5 Monev	5 Kali	69.061										69.061	Bagian Kemas Kesra	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan P3APPKB	Jumlah koordinasi, konsultasi dan monitoring yang dilaksanakan	5 Jumlah	5 Kali	100.000										100.000	Bagian Kemas Kesra	
			Penguatan dan keterpauan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan P3APPKB	Jumlah kegiatan koordinasi dan monev bidang ketenagakerjan transmigrasi dan P3APPKB	5 Keg			5 Keg	50.000	5 Keg	50.000	5 Keg	50.000	5 Keg	100.000	5 Keg	250.000	Bagian Kemas Kesra	
			penguatan manajemen tim pembina UKS/M	jumlah kegiatan koordinasi tim pembinaan UKS/M	5 Keg			5 Keg	30.000	5 Keg	30.000	5 Keg	69.000	5 Keg	69.000	5 Keg	198.000	Bagian Kemas Kesra	
			penyelenggaraan forum silahturahmi pemerintah daerah dan himpunan mahasiswa pelajar yang menempuh pendidikan diluar daerah	jumlah forum silahturahmi yang terlaksana	5 Kali			5 Kali	50.000	5 Kali	50.000	5 Kali	80.000	5 Kali	100.000	5 Kali	280.000	Bagian Kemas Kesra	
			penyelenggaraan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi	jumlah pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi	20 Jumlah			20 Jumlah	50.000	20 Jumlah	85.000	20 Jumlah	50.000	20 Jumlah	85.000	20 Jumlah	270.000	Bagian Kemas Kesra	
			pelaksanaan sistem informasi, evaluasi dapada bidang sosial dan kesehatan	jumlah laporan yang disusun	3 laporan			3 laporan	30.000	3 laporan	30.000	3 laporan	40.000	3 laporan	60.000	3 laporan	160.000	Bagian Kemas Kesra	
Meningkatn ya kualitas pelayanan publik	Meningkatny a kualitas pengadaan barang dan jasa		Program layanan pengadaan barang dan jasa	persentase pengadaan yang dilaksanakan sesuai RUP	95 Persen			95 Persen	1.000.000	95 Persen	1.000.000	95 Persen	1.000.000	95 Persen	1.000.000	95 Persen	4.000.000	Bagian PBJ	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan 2019	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Out Put) 2019	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja Perangkat daerah Penanggu ng jawab	Lokas i
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp(000)	Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	5	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang / Jasa	20 Paket			Paket	400.000	Paket	400.000	Paket	400.000	Paket	400.000	Paket	1.600.000	bagian PBJ	
			Advokasi, pembinaan pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Kegiatan Pengembangan SDM	5 dokume n			5 dokume n	100.000	5 dokume n	100.000	5 dokume n	100.000	5 dokumen	100.000	5 dokum en	400.000	bagian PBJ	
			Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Pengadaan	5 Lap			5 Lap	100.000	5 Lap	100.000	5 Lap	100.000	5 Lap	100.000	5 Lap	400.000	bagian PBJ	
			Pengelolaan LPSE	Jumlah RUP Pemkab. Kapuas Yang disusun	200 RUP			200 RUP	400.000	200 RUP	400.000	200 RUP	400.000	200 RUP	400.000	200 RUP	1.600.000	bagian PBJ	
Meningkatn ya penyelengg araan pemerintah daerah	meningkatnya kinerja penyelenggar aan pemerintah daerah		Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintahan	persentase indikator kinerja kunci yang berpredikat tinggi	90 Persen	90 Persen	114.000										Bagian Tapem		
		4.03 . 4.01.03 . 21 . 12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban pemerintah	laporan pertanggung jawaban diselesaikan tepat waktu	3 Laporan	3 Laporan	114.000										Bagian tata Pemerintaha n		
Jumlah							33.226.000		22.820.000		22.109.000		21.407.000		25.824.000		125.272.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Persentase PD yang nilai Sakipnya Minimal B	60 Persen	60 Persen	70 Persen	80,00 Persen	90,00 Persen	92,00 Persen	92,00 Persen	
2.	Skor EPPD	2,8 Skor	2,8 Skor	2,8 Skor	2,8 Skor	2,9 Skor	2,9 Skor	2,9 Skor	
3.	Persentase PD yang nilai reformasi Birokrasi Minimal B	60 Persen	60 Persen	70 Persen	80 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	
4.	Persentase Perikanan Kerjasama yang ditindaklanjuti	80 Persen	80 Persen	70 Persen	80 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	
5.	IKM Internal Setda	77 Indeks	77 Indeks	78 Indeks	79 Indeks	80 Indeks	81 Indeks	81 Indeks	
6.	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang dan Jasa	77 Indeks	77 Indeks	78 Indeks	79 Indeks	80 Indeks	81 Indeks	81 Indeks	
7.	IKM Eksternal Setda	3,15 Indeks	3,15 Indeks	3,25 Indeks	3,4 Indeks	3,5 Indeks	3,6 Indeks	3,6 Indeks	
8.	Rasio Elektrifikasi	97 Rasio	97 Rasio	97,50 Rasio	98 Rasio	98,5 Rasio	99 Rasio	99 Rasio	
9.	Persentase capaian Data Kinerja Yang tersedia	80 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	
10.	Persentase kepatuhan wajib lapor LHKPN	80 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
11.	Persentase Perda Yang ditetapkan Sesuai SOP	80 Persen	80 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	
12.	Persentase MOU yang ditindaklanjuti	80 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
13.	IKM layanan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	80 Indeks	80 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	90 Indeks	
14.	Persentase peningkatan layanan administrasi pembangunan energi dan SDA	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
15.	Persentase Pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai RUP	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 akan dilakukan setelah RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas dan akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas selama lima tahun mendatang yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, Renstra SKPD disusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kuala Kapuas, 23 April 2019

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas



RIANOVA, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621105 198903 1 015